



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

2025

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG





KATA PENGANTAR

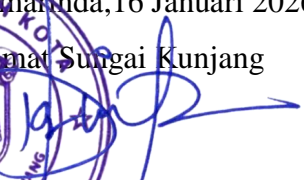
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan menuliskannya dalam bentuk laporan yang berjudul “LAPORAN KINERJA (LKj) Tahun 2025”.

LAKIP ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut.

Dengan segala keterbatasan, LAPORAN KINERJA ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini,

Selanjutnya terima kasih yang tak terhingga sudah sepatutnya kami ucapkan kepada Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Kami menyadari LAPORAN KINERJA ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan adanya LAPORAN KINERJA ini mudah-mudahan bisa sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Samarinda, 16 Januari 2026
Camat Sungai Kunjang

Dwi Siti Noorbayah, S.Sos, M.Si
NIP. 196905141990032005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

Ringkasan Eksekutif

BAB. I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi 4

C. Struktur Organisasi 6

D. Sumber Daya Aparatur 8

E. Aspek Strategis dan Permasalahan

F. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

G. Sistematika Penyajian 11

BAB.II PERENCANAAN KINERJA 12

A. Rencana Strategis 12

1. Visi dan Misi 13

2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja 15

3. Strategi dan Kebijakan 17

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. Capaian Kinerja Organisasi 25

B. Realisasi Anggaran 33

BAB.IV PENUTUP 43

LAMPIRAN

1. Perubahan Indikator Kinerja Utama tahun 2025

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

4. Penggunaan Anggaran Tahun 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2025 sekaligus memenuhi amanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisikan Gambaran Umum, Perencanaan Kinerja, dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah OPD yang melayani sektor publik, Kecamatan Sungai Kunjang mempunyai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis yang hendak dicapai demi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari misi dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Dari uraian diatas dan mengacu dengan tujuan Kota Samarinda, maka Kecamatan Sungai Kunjang menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Sasaran merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana Pemerintah yang harus dilaksanakan agar menjadi dasar pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, serta meningkatkan kesadaran organisasi terhadap kemungkinan adanya permasalahan karena tidak tercapainya harapan.

Dari uraian tersebut diatas, Kecamatan Sungai Kunjang menetapkan sasaran strategis dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”***



Pada tahun 2025 anggaran Kecamatan Sungai Kunjang adalah sebesar Rp. 58.637.927.279,-,- Digunakan untuk 3 Program 10 Kegiatan Dan 61 Sub Kegiatan

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Sungai Kunjang, maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Subbag, Kasi dan Kelurahan. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Sungai Kunjang lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reviu terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah secara periode mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sungai Kunjang dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan



dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda merupakan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ulu .

Dasar pembentukan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996.

B. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Organisasi

➤ **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP
2. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Lakip dan tata cara review
3. Permenpan 88 Tahun 2021 tentang pedoman evaluasi AKIP
4. Peraturan Walikota Samarinda No.11 Tahun 2024 tentang pedoman Evaluasi AKIP Pemerintah Kota Samarinda
5. Permenpan 22 Tahun 2024 tentang penilaian Kinerja Organisasi

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 024 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda disebutkan Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Kecamatan Sungai Kunjang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan



- pembangunan di lingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan SKPD terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis;
 - e. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - f. pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2014, susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Sungai Kunjang terdiri atas :

- a. Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan selanjutnya disebut SEKCAM terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum
- c. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban.
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.



- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dan Kecamatan Sungai Kunjang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan :

1. Kelurahan Loa Bakung
2. Kelurahan Loa Buah
3. Kelurahan Karang Asam Ulu
4. Kelurahan Lok Bahu
5. Kelurahan Teluk Lerong Ulu
6. Kelurahan Karang Asam Ilir
7. Kelurahan Karang Anyar

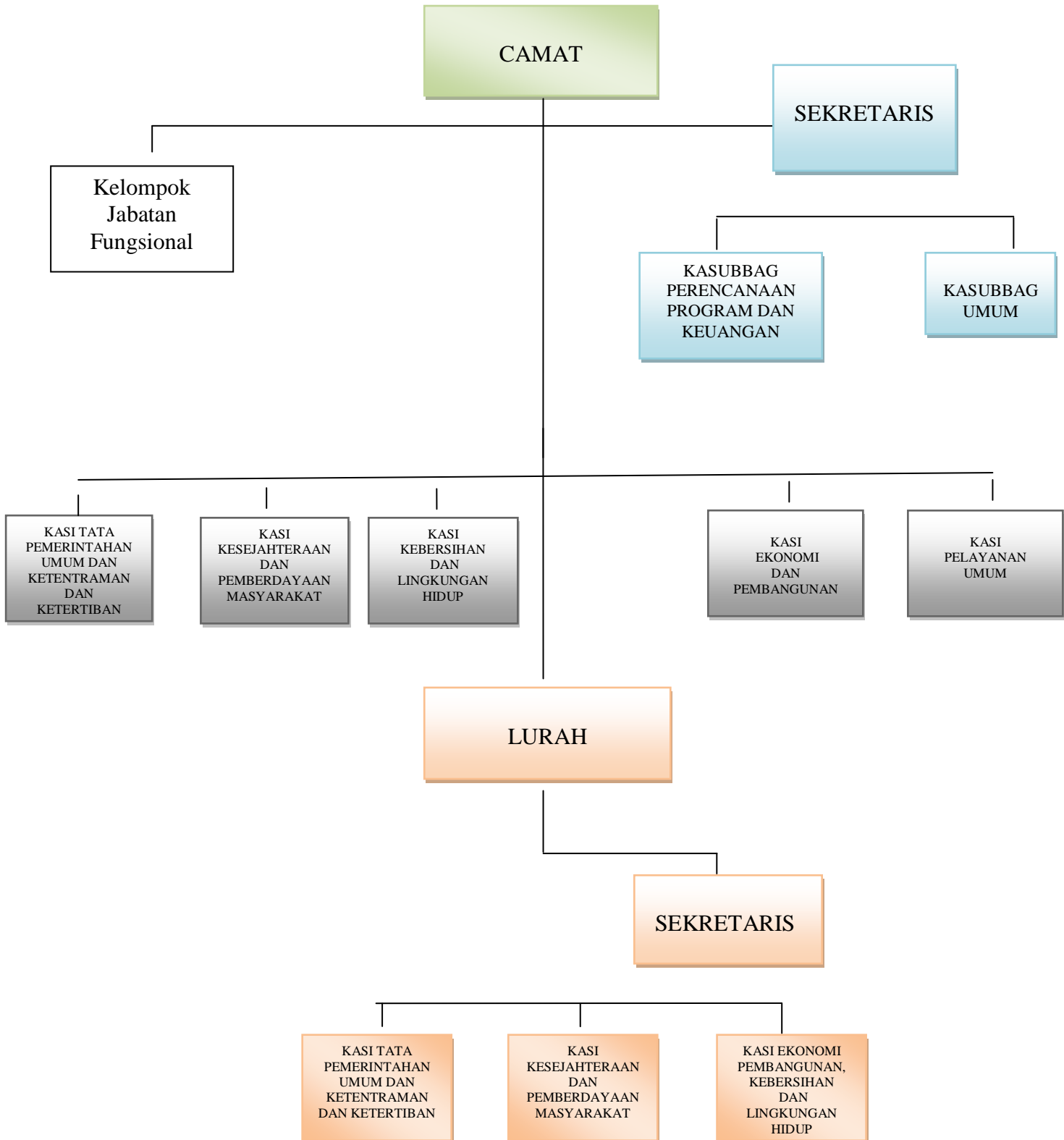
Dengan Susunan Organisasi satuan kerja Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup



Tabel 2.1

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda



D. Sumber Daya Kecamatan Sungai Kunjang

Sampai dengan bulan Desember 2025, jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Sungai Kunjang dan 7 (tujuh)Kelurahan Kota Samarinda sebanyak 83 orang, PPPK 29 Orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sungai Kunjang
Berdasarkan Klasifikasi Aparatur

Unit	Klasifikasi			Jumlah
	PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	
Kecamatan Sungai Kunjang	18	10	12	40
Kelurahan Teluk Lerong Ulu	10	3	5	18
Kelurahan Karang Anyar	12	2	2	16
Kelurahan Karang Asam Ulu	9	3	1	13
Kelurahan Karang Asam Ilir	10	3	3	16
Kelurahan Loa Buah	7	2	3	12
Kelurahan Lok Bahu	8	2	3	13
Kelurahan Loa Bakung	9	4	2	15
JUMLAH	83	29	31	143



Tabel 1.2

**Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sungai Kunjang
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Unit	Klasifikasi		Jumlah
	Laki - laki	Perempuan	
Kecamatan Sungai Kunjang	20	20	40
Kelurahan Teluk Lerong Ulu	9	9	18
Kelurahan Karang Anyar	5	11	16
Kelurahan Karang Asam Ulu	5	8	13
Kelurahan Karang Asam Ilir	10	6	16
Kelurahan Loa Buah	8	4	12
Kelurahan Lok Bahu	6	7	13
Kelurahan Loa Bakung	8	7	15
JUMLAH	71	72	143

Tabel 1.3

**Komposisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Sungai Kunjang
Berdasarkan Pangkat / Golongan**

Unit	Klasifikasi berdasarkan Pangkat/Golongan											
	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
Kecamatan Sungai Kunjang	-	-	-	-	1	-	4	2	1	5	4	1
Kelurahan Teluk Lerong Ulu	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	-	-
Kelurahan Katang Anyar	-	-	1	-	-	-	3	2	4	2	-	-
Kelurahan Karang Asam Ulu	-	1	-	-	-	2	-	-	-	5	1	-
Kelurahan Karang Asam Ilir	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3	-	-
Kelurahan Loa Buah	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-
Kelurahan Lok Bahu	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-
Kelurahan Loa Bakung	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-
JUMLAH	0	1	1	0	1	5	14	9	14	32	5	1



E. Permasalahan Isu (Isu Strategis)

Sebelum merumuskan Isu Strategis Perangkat Daerah, Kecamatan Sungai Kunjang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu Permasalahan di Kecamatan Sungai Kunjang sendiri, Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Untuk Permasalahan di Kecamatan Sungai Kunjang sendiri yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Permasalahan dan KLHS Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Kunjang di atas, maka Isu Strategis yang dirumuskan oleh Kecamatan Sungai Kunjang, di antaranya :

Reformasi Birokrasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Transformasi Digitalisasi Pelayanan Publik, serta Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Perencanaan Pembangunan

F. Sarana dan Prasarana

Sarana Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa ruang kerja staf. Selain itu Kecamatan Sungai Kunjang yang dilengkapi dengan peralatan seperti Komputer, printer dan fasilitas kerja lainnya. Sarana dan prasana tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

E. Hasil Dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Tabel 1.4

Progres Nilai AKIP Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2023-2024

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2023	78.55	BB
2	2024	79.50	BB



F. SISTEMATIK PENYAJIAN

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB. I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi
- c. Struktur Organisasi
- d. Sumber Daya Aparatur
- e. Hasil Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
- f. Sistematika Penyajian

BAB.II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
3. Strategi dan Kebijakan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

- C. Capaian Kinerja Organisasi
- D. Realisasi Anggaran

BAB.IV PENUTUP

LAMPIRAN

5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
7. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
8. Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2025 menguraikan target Kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sungai Kunjang selama tahun 2025. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan Benchmark (Studi Banding) dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam rencana kerja Tahun 2025 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

A. Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran lebih rinci dari perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, sehingga setiap langkah yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis membutuhkan integrasi antara keterampilan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya, agar memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis.

Dasar penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Adapun Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah

“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”

Sesuai dengan harapan “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju” sebagai Visi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan daerah sebagai berikut :



1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing ;
2. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan ;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ;
4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologis ;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Sungai Kunjang mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Samarinda Nomor 5 (lima), yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel”***,

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel

Strategi :

- Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik
- Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan
- Meningkatkan Kualitas Dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

Kebijakan :

- Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan



- Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan
- Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Dokumen.

a. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025.

Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil review selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi, Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan Kecamatan Sungai Kunjang

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2030
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Indeks	4.30	4.70

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sasaran Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda adalah :

”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah”

Berdasarkan sasaran kecamatan sungai kunjang, adapun Indikator sasaran kecamatan sungai kunjang adalah

”Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah”



Tabel 2.2

Tujuan , Sasaran, Indikator dan Target

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	4,30	4,50	4,55	4,60	4,65	4,75
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah (Indeks)	3.25	3.35	3.45	3.55	3.65	3.75



Tabel 2.3

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Tujuan / Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
							Fasilitas Kunjungan Tamu
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pengadaan Mebel
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas , Perorangan Dindas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karang Anyar
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karang Asam Ulu
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karang Asam Ilir
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lok Bahu



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Loa Buah
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Loa Bakung
					Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ulu
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Anyar
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ulu
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam ilir
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lok Bahu
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Buah



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Bakung
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang anyar
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam ulu
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ilir
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lok bahu
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Buah
							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Bakung
							Evaluasi Kelurahan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Sungai Kunjang)
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ulu
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Anyar
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Asam Ulu
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Asam Ilir
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Lok Bahu



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Loa Buah
							Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Loa Bakung

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sungai Kunjang Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	UU No. 25 Tahun 2009, Peraturan Menteri PANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana dirubah terakhir melalui Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 dan Perwali Samarinda No. 38	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang penilaiannya meliputi 6 (enam) aspek, diantaranya : 1) Kebijakan Pelayanan Publik, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana dan Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan	Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Dasar Hukum	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tahun 2023	Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi	Pengaduan, 6) Inovasi Pelayanan Publik	

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Sungai Kunjang ditetapkan strategi seperti berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Strategi :
 1. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik
 2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan
 3. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, pelaporan Dan evaluasi Kinerja

b. Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda memiliki 2 Arah Kebijakan resmi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
2. Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi Bersama terkait Pembangunan



3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan evaluasi Kinerja serta sumber daya manusia (SDM) yang menangani dokumen.

Tabel 2.4

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

Visi : Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan dan Sistem Pelayanan Publik melalui Penerapan Inovasi dan Teknologi, terutama Teknologi Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik, serta Mendorong Ide-Ide Baru dan Solusi Kreatif dalam Menghadapi Tantangan Pemerintahan
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	Peningkatan Kerjasama dan Kolaborasi dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendiskusikan Isu-Isu Publik dan Mencari Solusi



Visi : Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Bersama terkait Pembangunan
		Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan, pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja serta sumber daya Manusia (SDM) yang menangani dokumen.

5. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang



diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Untuk Tahun 2025, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda menetapkan 1 (Satu) Sasaran yang akan dicapai dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,25

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 3 program yang dijabarkan dalam 10 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan pada Tahun 2025.

Pembagian program dan kegiatan dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Sesuai dengan visi Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam Renstra adalah **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”**, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;



3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Kegiatan adalah aktifitas yang merupakan penjabaran dari Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun program/kegiatan Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2025 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan public

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan

1. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang
2. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang Kelurahan Loa Bakung
3. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang Kelurahan Karang Asam Ulu
4. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang Kelurahan Karang Asam Ilir
5. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang Kelurahan Loa Buah
6. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang Kelurahan Teluk Lerong Ulu
7. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang Kelurahan Karang Anyar
8. Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan sungai kunjang Kelurahan Lok Bahu.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan pemberdayaan Kelurahan

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan
2. Evaluasi Kelurahan
3. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Loa Bakung



4. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Karang asam Ulu
5. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Karang asam Ilir
6. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Loa Buah
7. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Teluk lerong Ulu
8. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Karang Anyar
9. Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Lok Bahu
10. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Bakung
11. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ulu
12. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ilir
13. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Buah
14. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Larong Ulu
15. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar
16. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lok Bahu

b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan

1. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Sungai Kunjang)
2. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Teluk Lerong Ulu)
3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Karang Anyar)
4. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Karang Asam Ulu)
5. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Karang Asam Ilir)
6. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Lok Bahu)



7. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Loa Buah)
8. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar – keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Loa Bakung)

3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor
5. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD



- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan
 - 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3. Sub Kegiatan pengadaan Mebel
 - 4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas perorangan dinas operasional lapangan
 - 3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4. Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 5. Sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target indikator kinerja sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

Untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran/program/kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan

Interval Nilai	Kategori	Makna
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 - 4,00	B	Baik
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 - 3,00	C	Cukup
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 - 2,00	D	Prioritas Pembinaan
1,01 - 1,50	E	Prioritas Pembinaan
0 - 1,00	F	Prioritas Pembinaan

2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Hingga akhir Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, adapun capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun 2025

Hasil Pengukuran atas capaian kinerja tahun 2025 sebagaimana table berikut

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,25	2,60	80

Analisis pencapaian indicator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sasaran kecamatan sungai kunjang yaitu Indeks Pelayanan publik (IPP) Perangkat Daerah pada tahun 2025 terealisasi dengan nilai 2,60 atau target 3,25 telah mencapai nilai 80 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah ini bersumber dari Hasil Penilaian Dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda selama tahun 2025. Pengukuran dilakukan secara Tahunan.

Dari hasil Evaluasi pengukuran kinerja yang di peroleh dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda terhadap sasaran strategis di peroleh gambaran bahwa indicator Sasaran yang di tetapkan menghasilkan angka capaian kinerja 2,60 yang mempunyai makna Cukup.



➤ FAKTOR PENGHAMBAT

1. Belum optimalnya pengelolaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Meskipun SKM telah dilaksanakan, namun belum disusun rencana tindak lanjut secara formal dan rekomendasi hasil SKM belum ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) tidak memperoleh nilai, sehingga berdampak pada rendahnya capaian IPP perangkat daerah
2. Belum tersedianya mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi petugas pelayanan serta belum adanya sistem pemberian penghargaan kepada petugas dengan kinerja pelayanan yang baik. Kecamatan Sungai Kunjang belum memiliki program pembinaan, evaluasi rutin, maupun pemberian apresiasi secara formal kepada petugas pelayanan
3. Belum ada inovasi serta sumberdaya yang mendukung pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan

➤ FAKTOR PENDUKUNG :

1. Telah diterapkannya 5 budaya pelayanan oleh petugas pelayanan. Petugas pelayanan telah menunjukkan sikap ramah, sopan, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Kunjang, seperti ruang pelayanan, loket pelayanan, ruang tunggu, serta perangkat komputer dan media informasi pelayanan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih diperlukan penyempurnaan secara bertahap untuk memenuhi standar pelayanan publik secara optimal
3. Telah berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Kunjang. Masyarakat dapat menyampaikan konsultasi maupun pengaduan secara langsung kepada petugas pelayanan, dan petugas memberikan respons serta penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



➤ DAMPAK

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2025 sebesar 2,60 dengan kategori Cukup menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat, inovasi pelayanan publik, dan pembinaan SDM pelayanan. Namun demikian, pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik didukung oleh penerapan budaya pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Kecamatan Sungai Kunjang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya.

2. Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.00	88.23	82.25	80.13	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat DiWilayah	70.25	99.92	70.50	98.81	-	-



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Kecamatan						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	-	-	-	-	3,25	2,60

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra (Perencanaan Strategis) Kota Samarinda

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,75	2,60	69,33

Dari Tabel diatas dapat dilihat pada indicator kinerja indeks pelayanan public (IPP) perangkat daerah memiliki target akhir 3,75 dengan realisasi tahun 2025, 2,60 atau 69,33 % dan pencapaian targetnya belum melampaui target akhir Renstra.



4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional**

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Persentase Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	2,60	NA	NA

Berdasarkan table diatas perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi nasional dapat di ketahui bahwa capaian kinerja kecamatan sungai kunjang kota samarinda untuk indicator Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 dengan realisasi 2,60 jika dibandingkan dengan nilai realisasi nasional yang tidak ada maka pencapaian kinerja ini nihil.

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Dari capaian kinerja tahun 2025 dengan indicator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah terdapat realisasi 2,60 atau dengan capaian 80% kategori C (Cukup) masih kurang dari target.

Adapun beberapa factor yang mendukung keberhasilan dan Faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran dan Indikator sasaran dikecamatan Sungai Kunjang antara lain :

a. **Faktor yang mendukung keberhasilan :**

- 1.Telah diterapkannya 5 budaya pelayanan oleh petugas pelayanan. Petugas pelayanan telah menunjukkan sikap ramah, sopan, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



2. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Kunjang, seperti ruang pelayanan, loket pelayanan, ruang tunggu, serta perangkat komputer dan media informasi pelayanan untuk mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat, meskipun masih diperlukan penyempurnaan secara bertahap untuk memenuhi standar pelayanan publik secara optimal
3. Telah berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan pelayanan publik di Kecamatan Sungai Kunjang. Masyarakat dapat menyampaikan konsultasi maupun pengaduan secara langsung kepada petugas pelayanan, dan petugas memberikan respons serta penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. Faktor - faktor yang menjadi hambatan :

1. Belum optimalnya pengelolaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Meskipun SKM telah dilaksanakan, namun belum disusun rencana tindak lanjut secara formal dan rekomendasi hasil SKM belum ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) tidak memperoleh nilai, sehingga berdampak pada rendahnya capaian IPP perangkat daerah
2. Belum tersedianya mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi petugas pelayanan serta belum adanya sistem pemberian penghargaan kepada petugas dengan kinerja pelayanan yang baik. Kecamatan Sungai Kunjang belum memiliki program pembinaan, evaluasi rutin, maupun pemberian apresiasi secara formal kepada petugas pelayanan
3. Belum ada inovasi serta sumberdaya yang mendukung pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan

c. Dampak

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2025 sebesar 2,60 dengan kategori Cukup menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi



ini berdampak pada belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat, inovasi pelayanan publik, dan pembinaan SDM pelayanan. Namun demikian, pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik didukung oleh penerapan budaya pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Kecamatan Sungai Kunjang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya

d. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sungai Kunjang adalah melalui

- penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat,
- peningkatan motivasi dan kompetensi petugas pelayanan,
- pengembangan inovasi pelayanan publik,
- penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat,
- penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan,
- serta penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya Untuk Tahun 2025

penyerapan anggaran Kecamatan Sungai Kunjang mencapai 97,58% yaitu dari total anggaran Rp. 58.637.927.279,- dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP 2025) 61 dana yang didapat direalisasikan sebesar Rp. 57.223.368.673,- atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan dana yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.414.558.606,-



7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dengan melihat persentase pencapaian kinerja tahun 2025 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2025

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun Anggaran sebesar Rp. 58.637.927.279,- Dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 57.223.368.673,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.58%, dengan Silpa Rp. 1.414.558.606,-.

Pencapaian Kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada kecamatan sungai kunjang tahun 2025 berhasil dalam mencapai sasaran, adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	(%)
	Kecamatan Sungai Kunjang	58.637.927.279	57.223.368.673	97,58
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.575.461.328	18.417.343.918	94.08
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.922.000	155.455.320	94.25
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.154.000	83.837.500	89.99



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	(%)
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.099.250	47.962.320	99,71
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.668.750	23.655.500	99,94
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.832.059.076	15.942.371.298	94,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.467.604.576	13.759.106.246	95,10
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.321.571.000	2.140.510.552	92,20
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.883.500	42.754.500	99,69
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.750.000	72.885.920	79,97
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	73.750.000	72.885.920	98,82
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.733.200	322.748.084	95,56
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.476.000	13.392.843	99,38
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.650.000	178.626.006	95,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.850.000	97
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	8.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.664.700	48.620.500	99,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3.000.000	2.970.000	99
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	11.981.600	99,84
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.942.500	54.307.135	89,11



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	(%)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.150.000	934.195.190	97.50
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.140.000	254.930.000	98
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.010.000	601.890.000	98.03
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	54.000.000	52.329.200	96.91
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	5.240.000	52,4
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.805.990	98.06
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.205.252	483.215.987	91.66
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	467.205.252	427.075.987	91.41
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000	5.140.000	57.11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000	51.000.000	100,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.641.800	506.472.119	74.3
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas , Perorangan Dindas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.800.000	136.011.132	69.46
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.191.800	179.297.798	61,15
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.250.000	38.120.000	99.61



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	(%)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.300.000	106.966.189	99,69
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.100.000	46.095.000	97,87
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.126.957.269	3.018.283.051	96,52
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.126.957.269	3.018.283.051	96,52
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.611.868.000	1.520.587.702	94,33
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Teluk Lerong Ulu	170.545.500	170.545.160	99,99
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karang Anyar	167.661.250	167.471.660	99,88
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karang Asam Ulu	168.977.444	168.706.974	99,83
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Karang Asam Ilir	188.002.500	180.147.500	95,82
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lok Bahu	220.258.750	219.959.910	99,86
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Loa Buah	169.445.825	162.864.985	96,11
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Loa Bakung	430.198.000	427.999.160	99,48
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.932.258.682	35.790.374.904	91,92



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	(%)
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	38.547.981.620	35.406.590.811	91.85
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.827.500	26.027.500	87.26
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ulu	6.010.490.000	6.000.250.000	99.99
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Anyar	2.721.000.000	2.721.000.000	100,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam Ulu	2.720.968.750	2.720.875.000	99.99
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Asam ilir	2.502.362.500	2.502.362.500	100,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lok Bahu	3.676.000.000	3.675.840.000	99.99
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Buah	1.452.792.500	1.451.522.500	99,91
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Loa Bakung	6.010.490.000	5.939.220.000	98.84
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ulu	1.826.317.773	1.825.619.149	99.96
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Anyar	1.657.411.318	1.653.275.604	99.75
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ulu	1.707.405.988	1.698.208.291	99.46
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karang Asam Ilir	1.530.287.358	1.524.886.967	99.64
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lok Bahu	2.211.357.296	2.211.049.003	99.98
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Buah	889.106.705	888.638.973	99.94
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loa Bakung	3.577.163.932	3.534.201.324	98.79
	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	25.000.000	20.124.000	80,49



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	(%)
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	384.277.062	469.749.813	99,77
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Sungai Kunjang)	75.508.000	75.401.000	99.85
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ulu	41.564.000	41.442.000	99.70
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Anyar	42.474.375	42.461.500	99.97
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Asam Ulu	47.733.969	47.733.000	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Asam Ilir	41.173.156	41.173.156	100,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Lok Bahu	40.554.125	40.396.500	99.61
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Loa Buah	48.032.687	47.940.187	99.81
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerjasama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Loa Bakung	47.236.750	47.236.750	100



Tabel 3.6
Laporan Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2025

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	19.575.461.328	18.417.343.918	94.08	1.149.587.470
2	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.126.957.269	3.018.283.051	96.52	92.554.218
3	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	35.935.508.682	35.790.374.904	99.60	138.985.232
	Jumlah	58.637.927.279	57.223.368.673	97.58	1.414.558.606

- Analisis Penggunaan Dana Tahun 2025

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda DPA Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan total nilai keseluruhan Belanja adalah sebesar Rp. **58.637.927.279,-** sedangkan realisasi anggaran Belanja mencapai Rp. **57.223.368.673,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **97.58 %**, dengan sisa Pagu Rp. **1.414.558.606,-**.

Dilihat dari tabel laporan realisasi capaian anggaran tahun 2025, penyerapan anggaran tahun 2025 untuk Kecamatan Sungai Kunjang secara umum menunjukkan hasil yang relative baik, terlihat dari hasil Persentase capaian penyerapan anggaran yang mencapai 97.58 %.



C. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) merupakan proses pengukuran sistematis terhadap capaian dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat daerah. Berikut Penilai Kinerja Organisasi (PKO) Kecamatan Sungai Kunjang

Tabel 3.7
Penilaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))	Nilai SAKIP
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3.25	2.6	80.00 %	80.00 %	10 %	72.00%	79.5
	Total Capaian PK (4)							72.00%	
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							72.00%	
	Predikat PKO (6)							Butuh Perbaikan	



BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. LAPORAN KINERJA (LKj) ini disusun sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 13/5278JDI.PAN-RBI1212014 tentang penyampaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor 000.8.6.3/4963/013.02 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian kinerja Tahun 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Sungai Kunjang terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2025 umumnya menggambarkan kinerja yang masih belum optimal.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sungai Kunjang Tahun 2025 sebesar 2,60 dengan kategori Cukup menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat, inovasi pelayanan publik, dan pembinaan SDM pelayanan. Namun demikian, pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik didukung oleh penerapan budaya pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta berjalannya layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Kecamatan Sungai Kunjang untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya



Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam Mencapai Target kinerja. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Meskipun SKM telah dilaksanakan, namun belum disusun rencana tindak lanjut secara formal dan rekomendasi hasil SKM belum ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) tidak memperoleh nilai, sehingga berdampak pada rendahnya capaian IPP perangkat daerah
2. Belum tersedianya mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi petugas pelayanan serta belum adanya sistem pemberian penghargaan kepada petugas dengan kinerja pelayanan yang baik. Kecamatan Sungai Kunjang belum memiliki program pembinaan, evaluasi rutin, maupun pemberian apresiasi secara formal kepada petugas pelayanan
3. Belum ada inovasi serta sumberdaya yang mendukung pelaksanaan inovasi secara berkelanjutan

➤ **Upaya Perbaikan**

Adapun Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Sungai Kunjang adalah melalui

1. penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat
2. peningkatan motivasi dan kompetensi petugas pelayanan
3. pengembangan inovasi pelayanan publik,
4. penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat,
5. penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan,
6. penguatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Dengan LAPORAN KINERJA (LKj) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Samarinda, 16 Januari 2025

Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si

NIP. 196905141990032005

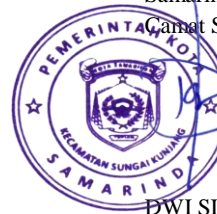
LAMP IRAN

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DASAR HUKUM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	UU No.25 Tahun 2009 Dan Peraturan Menteri PANRB No.29 Tahun 2022 sebagaimana dirubah terakhir melalui permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 Dan Perwali Samarinda No.38 Tahun 2023	Indeks Pelayanan Publik adalah Indeks yang di gunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan inovasi pelayanan	Hasil Penilaian dari Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda yang penilaiannya Meliputi 6 (Enam) Aspek, Diantaranya : 1. Kebijakan Pelayanan Publik 2. Profesionalitas SDM 3. Sarana Dan Prasarana 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik 5. Konsultasi Dan Pengaduan 6. Inovasi Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda

Samarinda, 02 Oktober 2025

Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos.M.Si
NIP.196905141990032005

**CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PERSENTASE (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3.25	2.60	80

Samarinda, 10 Februari 2026

Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos.M.Si

NIP.196905141990032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No.25 RT.81 Kel Loa Bakung, Telp (0541) 271569

Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129

<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **CAMAT SUNGAI KUNJANG**

selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **ANDI HARUN**

Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

ANDI HARUN

Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si

NIP. 196905141990032005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Indeks	3,25

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan/Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran :

- Rp. 19.575.461.328,-
Rp. 3.126.961.269,-
Rp. 35.935.508.682,-

Pihak Kedua,



Samarinda, 10 November 2025

Pihak Pertama,



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 196905141990032005

**PENGUNAAN ANGGARAN
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PRORAM		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN KEGIATAN	
			URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TERKAIT	(Rp)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TERKAIT	(Rp)	KEU (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IKM	Rp 19,410,539,328	Rp 18,259,255,338	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Di Susun Sesuai SOP	Rp 164,922,000	Rp 155,455,320	94.26
				Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Rp 164,922,000	Rp 155,455,320	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 93,154,000	Rp 83,837,500	90.00
						Rp 18,414,710,658	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Rp 48,099,250	Rp 47,962,320	99.72
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 23,668,750	Rp 23,655,500	99.94
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Dan Di Laporkan Secara Tepat Waktu	Rp 16,832,059,076	Rp 15,942,238,038	94.71
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Rp 14,467,604,576	Rp 13,758,972,986	95.10
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Rp 2,321,571,000	Rp 2,140,510,552	92.20
							Kordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Rp 42,883,500	Rp 42,754,500	99.70
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	Rp 73,750,000	Rp 72,885,920	98.83
							Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 73,750,000	Rp 72,885,920	98.83
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Rp 337,733,200	Rp 322,748,084	95.56
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp 13,476,000	Rp 13,392,843	99.38
							Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Rp 186,650,000	Rp 178,626,006	95.70
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 5,000,000	Rp 4,850,000	97.00
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000	100.00

						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang disediakan	Rp 48,664,700	Rp 48,620,500	99.91
						Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Rp 3,000,000	Rp 2,970,000	99.00
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tmu	Rp 12,000,000	Rp 11,981,600	99.85
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Rp 60,942,500	Rp 54,307,135	89.11
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp 958,150,000	Rp 934,195,190	97.50
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	Rp 260,140,000	Rp 254,930,000	98.00
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Di Sediakan	Rp 614,010,000	Rp 601,890,000	98.03
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp 54,000,000	Rp 52,329,200	96.91
						Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 10,000,000	Rp 5,240,000	52.40
						Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	100.00
						Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp 10,000,000	Rp 9,805,990	98.06
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi sesuai SOP	Rp 527,205,252	Rp 483,215,987	91.66
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	Rp 467,205,252	Rp 427,075,987	91.41
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 9,000,000	Rp 5,140,000	57.11
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rp 51,000,000	Rp 51,000,000	100.00
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	Rp 681,641,800	Rp 503,972,119	73.94
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan	Rp 195,800,000	Rp 136,011,132	69.46
						Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan	Rp 293,191,800	Rp 176,797,798	60.30
						Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang dipelihara	Rp 38,250,000	Rp 38,102,000	99.61
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Rp 107,300,000	Rp 106,966,189	99.69
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Rp 47,100,000	Rp 46,095,000	97.87

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	Rp 3,126,957,269	Rp 3,018,283,051	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	Rp 3,126,957,269	Rp 3,018,283,051	96.52
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 1,611,868,000	Rp 1,520,587,702	94.34
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Teluk Lerong Ulu)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 170,545,500	Rp 170,545,160	100.00
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (kelurahan Karang Anyar)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 167,661,250	Rp 167,471,660	99.89
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Karang Asam Ulu)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 168,977,444	Rp 168,706,974	99.84
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Karang Asam Ilir)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 188,002,500	Rp 180,147,500	95.82
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Lok Bahu)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 220,258,750	Rp 219,959,910	99.86
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Loa Buah)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 169,445,825	Rp 162,864,985	96.12
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Loa Bakung)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan DiTingkat Kecamatan	Rp 430,198,000	Rp 427,999,160	99.49
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	Rp 35,935,508,682	Rp 35,790,449,904	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 35,551,231,620	Rp 35,406,590,811	99.59
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp 29,827,500	Rp 26,027,500	87.26
							Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Rp 25,000,000	Rp 20,124,000	80.50
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Teluk Lerong Ulu)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 3,013,740,000	3,013,740,000	197.07
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karang Anyar)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 2,721,000,000	Rp 2,721,000,000	100.00
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karang Asam Ulu)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 2,720,968,750	Rp 2,720,875,000	100.00
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karang Asam Ilir)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 2,502,362,500	Rp 2,502,362,500	100.00

						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lok Bahu)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 3,676,000,000	Rp 3,675,840,000	100.00
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Loa Buah)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 1,452,792,500	Rp 1,451,522,500	99.91
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Loa Bakung)	Jumlah Sarana Dan prasarana yang terbangun	Rp 6,010,490,000	Rp 5,939,220,000	#REF!
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Teluk Lerong Ulu)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	Rp 1,826,317,773	Rp 1,825,619,149	99.96
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karang Anyar)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	Rp 1,657,411,318	Rp 1,653,275,604	99.75
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (karang Asam Ulu)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	Rp 1,707,405,988	Rp 1,698,208,291	99.46
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karang Asam Ilir)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	Rp 1,530,287,358	Rp 1,524,886,967	99.65
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Loak Bahu)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	Rp 2,211,357,296	Rp 2,211,049,003	99.99
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Loa Buah)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di	Rp 889,106,705	Rp 888,638,973	99.95
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Loa Bakung)	Jumlah Pokmas Dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Rp 3,577,163,932	Rp 3,534,201,324	98.80
						Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp 384,277,062	Rp 383,859,093	99.89
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat (Kecamatan Sungai Kunjang)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 75,508,000	Rp 75,476,000	99.96
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat KelurahanTeluk Lerong Ulu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 41,564,000	Rp 41,442,000	99.71
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Anyar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 42,474,375	Rp 42,461,500	99.97
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang AsamUlu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 47,733,969	Rp 47,733,000	100.00
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Karang Asam Ilir	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 41,173,156	Rp 41,173,156	100.00

					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Lok Bahu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 40,554,125	Rp 40,396,500	99.61
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Loa Buah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 48,032,687	Rp 47,940,187	99.81
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun kerja sama antar - keluarga, warga dan kelompok masyarakat Kelurahan Loa Bakung	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp 47,236,750	Rp 47,236,750	100.00
					JUMLAH		Rp 58,637,927,279	Rp 57,223,368,673	97.58

Samarinda, 10 Januari 2026
CAMAT SUNGAI KUNJANG



DWI SITI NOORBAYAH, S.SOS.M.SI
NIP. 196905141990032005